

KERJASAMA JEPANG-ASEAN DALAM MENGURANGI MARINE PLASTIC DEBRIS ASEAN DI KAWASAN INDO PASIFIK

Rifky Alif Puspita¹, Megahnanda Alidyan Kresnawati²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
 Email : rifkyalif824@gmail.com; megahnanda.hi@upnjatim.ac.id

Submitted: 04-09-2023; Accepted: 12-10-2023; Published : 19-10-2023

ABSTRAK

Kawasan Indo Pasifik menjadi penyumbang sampah plastik laut terbesar dunia. Sampah plastik ini terbawa aliran sungai besar negara Asia Tenggara yang kemudian membendung di Samudera Hindia dan Pasifik. Permasalahan sampah plastik laut cukup kompleks karena menyebabkan kerusakan lingkungan, dampak ekonomi, penurunan kesehatan biota laut, dan mengancam kesehatan manusia yang mengonsumsi. Jepang dan ASEAN bekerjasama untuk mengatasi masalah ini dalam salah satu proyek Joint Statement Japan Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP). Penelitian ini berfokus pada kerjasama Jepang dan ASEAN dalam mengatasi sampah plastik laut (Plastic Marine Debris) dalam teori kerjasama keamanan maritim dan Regional Security Complex. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menghasilkan kerjasama Jepang-ASEAN berupa pelatihan, pengelolaan limbah, promosi penanggulangan sampah laut, koordinasi berbagai pihak, dan aksi kolaborasi UNEP. Kerjasama ini melahirkan penguatan kesadaran, edukasi, dan (amity) Jepang-ASEAN yang mendukung keamanan maritim dan ekonomi kawasan Indo Pasifik.

Kata Kunci: *Regional Security Complex, Indo Pasifik, Sampah laut, kemanan lingkungan*

ABSTRACT

The Indo Pacific region is the world's larger contributor to marine plastic debris. This plastic waste is carried by the flow of large rivers of Southeast Asian countries which then stem in the Indian and Pacific Oceans. The problem of marine plastic debris is quite complex because it causes environmental damage, economic impact, decreases the health of maritime biota, and threatens the health of humans who consume. Japan and ASEAN are working together to address this issue in one of the Joint Statement Japan Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP) projects. This research focuses on Japan and ASEAN cooperation in overcoming plastic marine debris in the theory of maritime security cooperation and Regional Security Complex. This research uses qualitative methods with descriptive research types that result in Japan-ASEAN cooperation in the form of training, waste management, promotion of marine debris prevention, coordination of various parties, and UNEP collaborative actions. This cooperation resulted in the strengthening of Japan-ASEAN awareness, education, and (amity) that supports the maritime and economic security of the Indo Pacific region.

Keywords: *Regional Security Complex, indo pacific, marine debris, environmental security*

PENDAHULUAN

Indo Pasifik merupakan konsep geografis yang menggabungkan negara-negara di belahan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dalam satu kawasan tunggal. Kawasan ini muncul dengan ciri khas lautan luas dengan potensi biota laut sekaligus kawasan strategis dari jalur perdagangan

maritim dunia. Oleh karena itu, keamanan lautan kawasan akan menjadi satu hal krusial.

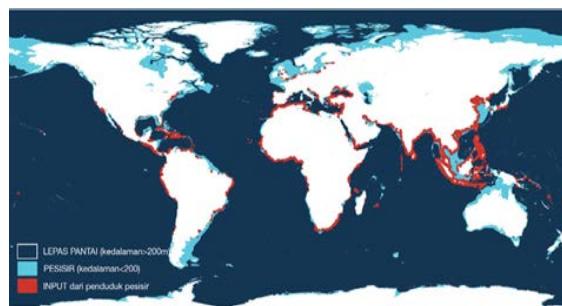
Lautan Indo Pasifik memuat sumber daya alam yang kaya, dengan potensi ribuan jenis ikan, terumbu karang, dan mineral lautan. Akan tetapi, lautan Indo Pasifik menghadapi tantangan serius dari permasalahan sampah plastik di lautan atau *plastic marine debris* mengancam biota laut ini. Produksi

plastik yang terus meningkat dan pola konsumsi plastik sekali pakai yang masih tinggi membuat peningkatan signifikan jumlah sampah plastik yang masuk ke lautan.

Lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya dalam berbagai produk penunjang kehidupan manusia. Setidaknya dari jumlah ini, 14 juta ton plastik dibuang sembarangan dan berakhir di lautan dalam setiap tahunnya. Menurut studi “*Changing Sails: Accelerating Regional Action for Sustainable Oceans in Asia and the Pacific*” pada tahun 2020, pembuangan sampah plastik ke laut banyak berasal dari negara di wilayah Indo-Pasifik (Musau 2017). Enam negara Indo Pasifik, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura menghasilkan 243 juta ton sampah di tahun 2016 (ESCAP 2022).

Berdasarkan data *Our World Data*, sampah-sampah plastik yang kini menggunung di lautan, 80% merupakan kiriman dari darat. Sungai Filipina menyumbang sampah lautan 6,4% dari total plastik sungai global (Ritchie and Roser 2022). Gambar 1 diatas memperlihatkan masuknya plastik sungai ke lautan 86% berasal dari sungai-sungai di Asia.

Gambar 1 Peta asal sampah plastik di laut



Sumber: ESCAP (2020)

Permasalahan yang muncul dari banyaknya sampah plastik di lautan Indo Pasifik adalah rusaknya kehidupan laut. Sampah plastik di lautan Indo Pasifik membahayakan lebih dari 800 spesies, termasuk mamalia laut, burung laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan (Finaka 2019). UNEP memperingatkan, tumpukan sampah dari jutaan botol plastik, botol soda, sedotan, maupun kantong plastik akan membahayakan hewan laut yang menelan. Sampah Indo Pasifik yang terlihat diperlukaan laut hanya 5% dari keseluruhan sampah plastik yang dibuang, 95% lainnya berada di bawah permukaan air (*Ocean Conservancy* dalam (Musau 2017)). Dalam menyelesaikan masalah sampah lautan ini negara tidak cukup

hanya melalui pengurangan volume penggunaan plastik di darat, tetapi juga dengan menekan distribusi sampah untuk meningkatkan kualitas biota laut dan mendukung perdagangan maritim. Permasalahan sampah plastik laut menjadi lebih kompleks, tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi dan maritim. Untuk itu, negara perlu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan negara kawasan ini, dan kerjasama Jepang dan ASEAN menjadi salah satu contohnya.

Kerjasama Jepang dan ASEAN terwujud dalam beberapa program untuk mendorong pengamanan lingkungan lautan dari tumpukan sampah plastik. Ini dilakukan karena kebersihan lautan Indo Pasifik penting untuk kepentingan Jepang dan ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bentuk Kerjasama Jepang dan ASEAN dalam mengurangi sampah laut di Indo Pasifik.

Teori Regional Security Complex

Regional Security Complex didefinisikan oleh Barry Buzan dan Ole Waever mengenai teori keamanan kawasan yang menekankan pada pemahaman dinamika keamanan internasional pada unsur regional atau kawasan. Teori RSC muncul dari ide atas sebagian besar ancaman muncul dari waktu yang singkat dengan jarak yang tidak terlalu jauh (Buzan and Waever 2003).

Berdasarkan teori ini, kawasan akan selalu dikaitkan dengan kedekatan geografis, kondisi domestik yang terjadi didalam suatu negara berpotensi mempengaruhi keamanan negara tetangga, hingga keamanan kawasan secara umum. Hal ini berasal dari anggapan bahwa ancaman akan menyebar dari jarak dekat dengan waktu yang cepat. Sehingga keamanan suatu kawasan akan dipengaruhi oleh pola hubungan atau kedekatan antar negara didalam satu kawasan.

Dalam mengkasi Buzan dan Ove Waever mengidentifikasi dan menilai perubahan di tingkat regional dengan sub struktur internal dan eksternal dalam melihat kesinambungan dan perubahan dalam suatu peristiwa. Teori ini membentuk empat variabel dalam kawasan keamanan. Pertama, batasan wilayah (*boundary*) berupa batasan secara geografis yang membedakan kawasan satu dengan keamanan kawasan lain di sekitarnya. Kedua, struktur anarki (*Anarchic structure*) terdiri dari minimal dua unit otonom. Ketiga, polaritas (*polarity*) berkaitan dengan distribusi kekuasaan antar unit aktor, berupa negara yang memiliki *great power* dalam mempengaruhi sistem internasional dan kompleksitas keamanan kawasan. RSC dapat melihat polaritas kekuatan global dan regional (unipolar, bipolar, multipolar), serta interaksi dan distribusi kekuatan baik antar sesama kekuatan domestik kawasan maupun di luar kawasan.

Keempat, struktur sosial (*social construction*) berupa pola pertemanan dan permusuhan antar unit yang nantinya dikaji dari faktor sejarah, budaya, agama, kondisi geografis dan lainnya.

Pola hubungan antar negara penting dalam pencapaian keamanan kawasan. Intraksi antar negara melahirkan konstruksi sosial yang terbentuk dari satu kawasan, dalam pola persahabatan (*amity*) dan pola permusuhan (*enmity*). Pola persahabatan muncul dari hubungan pertemanan antar negara yang baik dan kedekatan dalam perlindungan keamanan kawasan. Sedangkan pola permusuhan dilatarbelakangi sifat saling curiga (Buzan and Waever 2003). Waever mengelaborasikan pola-pola hubungan ini sebagai hasil konstruksi faktor historis negara-negara mengenai negara kawasan yang menjadi kawan dan menjadi lawan.

Keamanan Lingkungan

Teori keamanan lingkungan dianggap sebagai konsep keamanan yang terlepas dari power dan aktivitas militer sebagaimana konsep keamanan konvensional. Tulisan-tulisan keamanan nasional awal, menganggap keamanan lingkungan diaggap remeh, hingga kemudian pasca Perang Dingin tulisan-tulisan mengenai keamanan lingkungan bermunculan. Beberapa tulisan ini, menyoroti hubungan antara perubahan lingkungan hidup dengan konflik bersenjata (Barnet 2020).

Keamanan lingkungan menurut Jon Barnett penting dalam upaya keamanan nasional negara. Perubahan lingkungan akan melemahkan basis ekonomi yang menentukan kapasitas militer. Sumber daya alam menjadi bahan baku perdagangan maupun industri yang menunjang pertumbuhan ekonomi negara untuk pembelian alusista penguatan militer. Sumber permasalahan dari lingkungan dibedakan dari sektor asalnya. Pertama, negara penting memperhatikan keamanan lingkungan dalam sektor primer, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pertambangan. Terlebih untuk negara-negara pengekspor hasil pertanian keamanan lingkungan sektor ini, penting perannya untuk ekonomi negara dan permasalahan lingkungan jika tidak diselesaikan dengan baik akan mempengaruhi ekonominya. Kedua, ancaman lingkungan negara dari aktivitas endogen. Meskipun pada ancaman ini, terjadi diluar kendali negara tetapi dampaknya akan besar untuk negara. Sebagai contoh pada emisi global bahan perusak ozon, dampak jangka panjang dari uji penggunaan senjata nuklir, dampak kecelakaan reaktor, kebakaran hutan, dan emisi gas rumah kaca global (Barnet 2020).

Permasalahan lingkungan juga terjadi di lautan. Dalam UNCLOS 1982 Artikel no. 42, disebutkan jika setiap negara akan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan lautnya. Keamanan maritim disini berbentuk keamanan di lautan yang merepresentasikan *environmentalist* dengan melihat bahwa lautan sebagai objek keamanan yang harus dijaga. Pengamanan yang dimaksud mencakup pada proteksi dan keamanan lingkungan (*protection of the marine environment*) serta konservasi sumber daya yang ada di lautan, baik makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup. Pengamanan ini berdasarkan pada penjagana kelestarian dan keamanan laut dari ulah manusia atau *human existence*, perkembangan dan keamanan, maka pendekatan ini memperlihatkan karakter special laut berupa “*freedom for the seas*” termasuk didalamnya lingkungan kelautan dan ekosistem yang berada didalamnya.

METODE

sekunder yang terdapat dari buku, jurnal, artikel, dan report kerjasama Jepang-ASEAN yang dibukukan setiap tahunnya.

Data yang telah dikumpulkan dengan metode diatas, kemudian akan diolah dengan menggunakan kacamata empat variabel teori *Regional Security Complex* dan bentuk keamanan lingkungan, dalam menganalisa kerjasama Jepang-ASEAN dalam menghadapi permasalahan sampah plastik di laut. Penulis akan mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan analisa teori ini.

Penelitian kualitatif dipilih menjadi metode dalam penelitian ini karena mengungkapkan makna-makna dari abstrak yang kemudian dapat disajikan melalui penjelasan secara deskriptif. Jenis penelitian ini diambil juga karena metode penelitian deskriptif yang dipergunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah laut di Indo Pasifik menjadi satu permasalahan yang serius sejak 4 dekade terakhir. Indo Pasifik menjadi kawasan geostrategis lautan yang menghubungkan antar negaranya, sekaligus menjadi kawasan yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan dan polusi plastik (UNCTAD 2023). Ancaman ini bersifat menyeluruh ke semua negara dengan wilayah perairan yang saling terikat. Sifat sampah plastik yang ringan memudahkan bermindah tempat dari gelombang laut.

Permasalahan sampah plastik di laut menjadi perhatian karena mengancam kehidupan sumber daya laut dan kualitas hasil kelautan nelayan. Sembilan dari sepuluh negara Indo Pasifik merupakan pengekspor

hasil laut dunia, dengan 90% menggunakan perdagangan maritim dalam pengirimannya (Reiber 2018). Untuk itu, permasalahan sampah plastik di lautan menjadi permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan bersama.

Wilayah Laut Luas yang Terancam

Kawasan Indo Pasifik menjadi pertemuan geografis negara-negara pengekspor hasil tangkapan laut. Pemanfaatan sumber daya laut dimaksimalkan kawasan ini untuk perdagangan, sumber pangan, lapangan pekerjaan nelayan, dan sumber pendapatan negara. Jepang menjadi salah satu negara kawasan Indo Pasifik yang merasakan ancaman sampah laut akan merugikan negara. Sejak mengawali regionalisme Indo Pasifik melalui pembuatan visi FOIP, Jepang muncul sebagai negara kekuatan menengah yang berperan aktif dalam keamanan kawasan Indo Pasifik, khususnya Asia Tenggara yang menjadi koridor penting (Sciencepo 2021).

Pengamanan lingkungan kelautan Indo Pasifik penting untuk Jepang. Indo Pasifik menjadi jalur perdagangan maritim penting Jepang ke berbagai negara. Australia. Jepang mengimpor bijih besi, batu bara, dan kapas mentah dari Australia, serta ekspor Jepang ke Australia dan Selandia Baru melewati kawasan Indo-Pasifik ini. Selain itu, Jepang juga menjadi negara dengan tingkat konsumsi ikan laut tinggi, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor.

Jepang menyatakan kepeduliannya dan kontribusi mengatasi masalah sampah plastik laut di kawasan Indo Pasifik. Kerjasama yang diusung Jepang dan ASEAN mengadopsi pernyataan bersama atau *Joint Statement of the 23rd ASEAN-Japan Summit on Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo Pacific* sebagai landasannya. *Joint Statement* akan menjadi landasan kerjasama Jepang dan ASEAN sekaligus komitmen Jepang mendukung ASEAN dan kemitraan strategis keduanya. Jepang telah menyampaikan kemitraan strategis Jepang-ASEAN untuk Indo Pasifik merupakan sarana perdamaian, stabilitas, dan pencapaian kesejahteraan kawasan, dalam empat bidang kerjasama, yaitu Kerjasama maritim, konektivitas, UN Sustainable Development Goals 2030, dan kerjasama ekonomi.

Proyek Kerjasama Plastic Marine Debris Jepang-ASEAN

Proyek kerjasama Indo Pasifik Jepang dan ASEAN terdapat 73 proyek dengan penambahan 18 proyek tambahan AOIP. Dalam isu *plastic marine debris*, terdapat 4 proyek khusus penanganan sampah plastik yang tercatat di dalam

Japan's Cooperation for the ASEAN Outlook on the Indo Pacific (MOFA 2022);

a. Program Pelatihan untuk Pengelolaan Limbah Pelatihan untuk Mengatasi Sampah Laut.

Program ini dilaksanakan oleh JICA berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama Teknis antara Jepang dan ASEAN untuk mempromosikan perlindungan lingkungan. Program pelatihan ini bertujuan juga untuk memberikan kesempatan bagi para pejabat dalam bertanggung jawab atas pengelolaan limbah sekaligus belajar komprehensif dalam mengatasi masalah sampah laut. Keberadaan program ini untuk membantu membuat kebijakan mengembangkan rencana kebijakan sekaligus pengambilan tindakan di negara. Program ini dilakukan sejak tahun 2021 secara daring pada bulan Februari dan November, sedangkan di tahun 2022 pelatihan dilakukan tahapan pertama pada Oktober dan tahapan kedua di bulan November hingga Desember (MOFA 2022).

Program pelatihan pengelolaan juga diberikan pada mahasiswa, melalui "ASEAN-Japan Eco School for Marine Plastic Waste Education" yang diselenggarakan pada September 2021. Sebelumnya pada 16 Maret 2021, Jepang dan ASEAN melalui ASEAN-Jepang Center (AJC) mendeklarasikan *Future Leader's Declaration on ASEAN-Japan Cooperation for International Marine Plastic Waste (Eco-School Project)*, yang berupa deklarasi kerjasama Jepang dan ASEAN untuk mengurangi sampah laut (Eria 2023). Program pelatihan ini menjadi perwujudan dari deklarasi yang telah dibuat sebelumnya, dengan menghadirkan mahasiswa internasional dari Jepang dan 10 negara-negara anggota ASEAN. Program ini sekaligus menjadi pengimplementasian rekomendasi pendidikan dan kesadaran yang melibatkan pemuda.

Proyek ramah lingkungan yang mendukung ASEAN untuk memerangi sampah laut berisikan materi-materi mengenai kesadaran publik, pendidikan dan penjangkauan, sekaligus untuk memperkuat kemitraan antara Jepang dan ASEAN melalui multi-generasi dan kolaborasi lintas sektor antar pemuda, sektor pendidikan, dan pemerintah negara anggota ASEAN dan Jepang untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan limbah dan sampah laut (Eria 2023). Program ini sekaligus akan menjadi wadah untuk memelihara dan memulai kebiasaan menjaga lautan yang bersih. Semakin banyaknya pihak yang terlibat dan berkomitmen bersama, perubahan perilaku dan promosi mengenai upaya pengurangan sampah plastik akan lebih mudah. Keberadaan program dengan melibatkan mahasiswa, membuat program ini menampilkan pesan untuk kalangan pemuda di wilayah tersebut.

b. Promosi Langkah-langkah Pengurangan Sampah Laut

Jepang menyediakan pendanaan melalui JAIF sebesar 1 milyar Yen Jepang untuk pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesadaran dan hubungan masyarakat tentang pelestarian lingkungan meliputi pengurangan sampah plastik laut. Memanfaatkan dana integrase dari Jepang dan ASEAN, proyek ini akan mendukung pengelolaan sampah laut di kawasan Asia Tengara (MOFA 2022). Pendanaan JAIF untuk promosi tindakan pengurangan sampah laut sekitar 10 juta dolar AS, yang nantinya akan dipergunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesadaran dan kegiatan hubungan masyarakat tentang pelestarian lingkungan yang termasuk pengurangan sampah plastik di laut.

Melalui pendanaan JAIF terdapat program dokumenter mengenai sampah plastik laut dan promosi sampah laut, berupa penelitian bersama secara regional, pengembangan kapasitas pemantauan dan pengurangan sampah laut dari perikanan, perumusan Rencana Aksi Nasional, pengelolaan air limbah domestik terdesentralisasi, promosi masyarakat sirkular plastik, dan poin pembangunan berkelanjutan ASEAN pada ASEAN SDGs *Frontrunner Cities Programme* untuk mengatasi banyaknya sampah plastik laut yang berasal dari daratan.

c. Koordinasi permasalahan sampah laut berbagai kerangka

Koordinasi yang dimaksut dengan meningkatkan kapabilitas melalui keterlibatan dan kerjasama lembaga terkait, seperti Inisiatif Aksi Kooperatif Sampah Plastik Laut ASEAN+3 dan Kerangka kerja Implementasi G20 untuk Aksi sampah plastik. Jepang juga bekerjasama dengan Prakarsa Aksi Kooperatif Sampah Plastik Laut ASEAN+3 dan Pusat Pengetahuan Regional untuk Plastik Laut ERIA Debris yang aktif sejak 1 November 2022 (MOFA 2022).

Jepang juga telah terlibat dalam “*Osaka Blue Ocean Vision*” sehingga Jepang telah berbagi informasi, target, dan contoh praktis dan pengetahuan alami mengenai sampah laut kepada ASEAN maupun negara lain. Berdasarkan “*G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter*” Jepang juga membantu pembuatan Laporan G20 keempat tentang Tndakan terhadap Sampah Plastik Laut di tahun 2022 (MOFA 2022).

Pengkoordinasian ini melibatkan banyak lembaga, dengan memanfaatkan dana JAIF proyek pengelolaan sampah laut di kawasan ASEAN

terbagi dalam dua fase. Pada fase pertama, tahun 2019 sampai 2020 berupa proyek pengidentifikasi permasalahan (UN-DESA n.d.). Tahapan pengidentifikasi ini dilakukan di setiap negara yang terlibat, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang cukup dan dikembangkan sebuah garis besar rencana aksi nasional yang sistematis. Sedangkan pada fase kedua, berlangsung di tahun 2022 hingga 2023 berupa proses pengembangan rencana aksi nasional yang telah dibentuk pada fase pertama, sekaligus menyediakan peningkatan kapasitas pengelolaan limbah di negara-negara target. Pada fase ini, semua pihak akan berusaha mengembangkan kapasitas negara-negara di ASEAN untuk juga melakukan pemantauan sampah plastik di lautan.

d. Promosi Aksi Melawan Sampah Plastik di Asia dan Pasifik

Pada projek ini mendapatkan bantuan dari UNEP untuk saling berbagi pengetahuan ilmiah mengenai polusi plastik di Mekong, Gangga, dan sungai-sungai terpilih di Srilanka dan Myanmar. Nantinya dari pengetahuan yang didapat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan global pada 2020-2022. Salah satu program pada poin UNEP adalah CounterMEASURE II berupa program Aksi Melawan Sampah Plastik Laut di Asia dan Pasifik. Program yang dipimpin UNEP ini didanai pemerintah Jepang. Tujuan adanya program ini adalah untuk menghasilkan, berbagi, dan menyebarluaskan pengetahuan ilmiah mengenai polusi plastik di Mekong, Gangga, dan sungai-sungai tertentu di Myanmar sekaligus menginformasikan kebijakan dan keputusan untuk tingkat lokal, nasional, regional, dan global (CounterMeasure 2021).

Melalui program ini, UNEP membantu mengedukasi negara-negara banyak menyumbang polusi plastik dari sungai-sungainya. Didalam program kerjanya, UNEP menjelaskan bahwa sampah plastik di darat akan berakhir di lautan. Sampah laut tidak hanya yang terlihat diperlukaan dipesisir pantai maupun mengambang di lautan, tetapi banyak juga sampah yang terpendam di dasar lautan. Tentunya, permasalahan ini akan berdampak besar pada ketergangguan satwa liat di ekosistem pesisir pantai, lautan, dan air tawar (CounterMeasure 2021). Negara-negara ASEAN menjadi target dari program ini, terlebih negara-negara penyumbang sampah laut dari sungai, seperti Myanmar.

Proyek utama dari *CounterMeasure* UNEP pada sungai Mekong dan sungai Gangga. Cekungan Sungai Mekong merupakan rumah dari banyak spesies unik, seperti Ikan Lele Raksasa Mekong, Lumbalumba Irrawaddy, Bengal Florican, Elang Kerajaan Timur, dan Bangau Saurus. Diperkirakan terdapat 768

spesies ikan air tawar yang secara alamiah hidup di kawasan ini, dengan 24% spesies yang tinggal dan 87% adalah spesies bermigrasi. Migrasi ikan sebagian besar dari Sungai Tonle Sap di Kamboja dengan jumlah migrasi mencapai 12.000 ton ikan. Namun, keberadaan sampah-sampah ini berdampak besar pada spesies yang bermigrasi. Plastik telah menyebabkan kematian satu juga burung laut dan 100.000 mamalia laut dalam setiap tahunnya. Ini berasal dari karena terikat pada benda-benda plastik seperti jaring ikan atau benda plastik lain yang menyebabkan biota laut ini cedera, tercekik, dan pengurangan efisiensi makan yang berakhir dengan tenggelam. Penyebab kematian biota laut dapat berasal dari tertelannya plastik yang kemudian menghambat pencernaan (CounterMeasure 2021).

Program ini menasar sungai Mekong sebagai sungai besar yang mengalir dan melewati banyak negara. Sungai ini mengalir dari dataran tinggi Tibet melewati Myanmar, Laos, Thailand, dan kamboja, sebelum memasuki wilayah delta Vietnam (Hutt 2021). Sampah plastik sebagian besar mencemari sungai dan bermuara di lautan. Pemilihan sungai Mekong untuk program ini, tepat dilakukan mengingat negara-negara yang dilewatinya masih memanfaatkan perairan ini. Memulai program pengurangan sampah dari penyumbang sampah terbesar merupakan tindakan yang tepat. Kedekatan geografis negara membuat ketergantungan negara-negara sungai Mekong besar, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini, penting untuk keikutsertaan semua negara dalam kawasan. Karena sejalan dengan teori RSC Buzan dan Waever yang memperlihatkan ketergantungan negara dalam satu kawasan penting untuk menyelesaikan ancaman keamanan kawasan.

Peran Jepang dalam Kerjasama Sampah Plastik Laut

Jepang memainkan peran kuat dalam kerjasama ini. Pertama, dukungan Jepang dalam keamanan lingkungan Indo Pasifik sejalan dengan visi keamanan Indo Pasifik-nya *Free and Open Indo Pacific* (FOIP). Jepang mengawali regionalisme kawasan Indo Pasifik dari pernyataan Perdana Menteri Shinzo Abe atas ketidakpastian keamanan global dan memulai keinginannya menciptakan tatanan maritime kawasan yang bebas dan terbuk (Yadav 2022). Jepang kemudian meresmikan skema *Free and Open Indo Pacific* (FOIP) sebagai pandangan kebijakan membantuk tatanan kawasan yang bebas dan terbuka sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama, termasuk dalam supremasi hukum di tahun 2016.

Pembentukan kerjasama ini Jepang menggabungkan dua visi Indo Pasifik, dari *Free and Open Indo Pacific* (FOIP) miliknya dengan ASEAN *Outlook on the Indo Pacific* (AOIP) milik ASEAN. Jepang mengawali dukungan AOIP sejak diresmikan di tahun 2018, sehingga kerjasama yang dibentuk Jepang dan ASEAN untuk penyelesaian sampah plastik di laut, juga akan memasukkan prinsip utama AOIP seperti persatuan dan sentralitas ASEAN, inklusivitas, transparansi, penghormatan akan hukum internasional, serta melengkapi proses pembangunan komunitas ASEAN (JAIF ASEAN 2022).

Kedua, Jepang sangat memperhatikan keamanan lingkungan Indo Pasifik. Negaranya yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik mengalami kekhawatiran akan tumpukan plastik yang mempengaruhi komoditas perikanan ekspornya. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai skema kerjasama untuk menciptakan lingkungan keamanan yang ideal untuk ekonomi dan perdagangan maritimnya. Melalui kerjasama ini, kepentingan Jepang dalam mempertahankan kedudukan dalam perdagangan internasional jauh lebih stabil.

Ketiga, Jepang memberikan pendanaan kerjasama lingkungan sampah laut ini, melalui Japan-ASEAN *Integration Fund* dengan proyek Rencana Aksi Nasional untuk Negara Anggota ASEAN dan Lahan Terintegrasi dari 2019 sampai 2020 dan dijadwalkan selesai pada Oktober 2023. Proyek ini terbagi dalam dua fase, fase pertama akan mengidentifikasi beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi di kawasan, termasuk kurangnya kebijakan terpadu permasalahan sampah laut maupun lemahnya pengelolaan limbah pada dalam tingkatan pemerintah daerah. Sedangkan pada fase kedua lebih menekankan cara mengatasi masalah dan tantangan yang telah diidentifikasi pada fase pertama melalui beberapa cara. Proyek ini juga masuk dalam buku Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2025 karena mendukung Kerjasama Maritim sebagai salah satu bidang tematik dalam ASEAN *Outlook on the Indo Pacific* (AOIP).

Dinamika Kerjasama untuk keamanan lingkungan Indo Pasifik

Keberadaan program-program diatas juga menjadi cara Jepang dan ASEAN mencapai kepentingan dalam keamanan maritim. Kebersihan laut dari sampah akan menguntungkan keduanya. Jepang dengan jalur pembangunan di sepanjang negara pesisir Indo Pasifik sejalan Bantuan-bantuan sengaja diberikan Jepang untuk mencapai kepentingannya. Secara ekonomi, memang Jepang telah bertahun-tahun menjadi Investor terbesar di beberapa negara Asia tenggara. Bantuan dan investasi Jepang diperuntukkan untuk memperkuat kemampuan negara-negara

menyediakan keamanannya tersendiri, sekaligus untuk meningkatkan integrasi ekonomi didalam regional. Sehingga terbentuk regionalisasi kawasan Indo Pasifik yang strategis.

Kerjasama Jepang-ASEAN penting secara geografis penting untuk mengurangi sampah laut dari berbagai sisi. Kondisi ini sejalan dengan teori Buzan dan Waever yang menyatakan proses sekuritisasi akan terbentuk jika antar negara saling ketergantungan dalam membentuk keamanan kawasan. Jika dilihat dari variabel RSC, kerjasama menjadi poin penting untuk pencapaian keamanan, Jepang senangaja membentuk berbagai program yang secara tidak langsung akan menguatkan hubungan persahabatan dengan ASEAN atau dalam teori RSC membentuk pola *amity*.

Jepang melakukan penyinergan prinsip-prinsip dana FOIP dan AOIP dalam kerjasama Indo Pasifik, dengan artian Jepang hendak mewujudkan konsep keamanan sesuai kepentingan dua belah pihak dan secara tidak langsung menjelaskan multipolaritas didalam kawasan Indo Pasifik. Konsep-konsep yang diusung AOIP akan disinkronkan dengan prinsip yang dibawa Jepang pada FOIP sebelumnya, hingga membentuk landasan kebijakan bersama berbentuk *Joint statement*.

Jepang dan ASEAN bersama-sama dalam membentuk keamanan lingkungan dari permasalahan yang dibuat manusia atau *human existence*. Program untuk keamanan lautan diperlihatkan dari pendekatan berbagai lapisan masyarakat yang berpartisipasi. Pendekatan ini dilakukan untuk mempercepat perkembangan keamanan dalam berbagai sisi. Partisipasi pembuat kebijakan penting dalam pembuatan landasan hukum dan aturan, pendekatan pada masyarakat sebagai bentuk promosi kegiatan penanggulangan sampah plastik melalui daur ulang atau pencegahan melalui pengurangan penggunaan plastik. Semua program ini dilakukan untuk mencapai “*freedom for the seas*” termasuk didalamnya lingkungan kelautan dan ekosistem yang berada didalamnya

SIMPULAN

Kejasama Jepang dan ASEAN dalam pengurangan sampah laut di Indo Pasifik merupakan proyek kerjasama yang dilandasi pada *Japan Cooperation on ASEAN Outlook on the Indo Pacific*. Kerjasama ini memuat berbagai program, pertama pelatihan pengelolaan limbah dan platihan mengatasi sampah laut, kedua promosi langkah-langkah pengurangan sampah laut, ketiga koordinasi permasalahan laut berbagai kerangka,

dan keempat promosi aksi melawan sampah plastik Asia Pasifik bersama UNEP. Kerjasama yang terbentuk penting untuk pengurangan sampah laut di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan multi generasi, multi layer, dengan kontribusi beberapa lembaga berkaitan untuk pencapaian keamanan lingkungan atau *freedom for the sea*.

Kerjasama yang dilakukan Jepang dan ASEAN memperlihatkan upaya mencapai keamanan kawasan. Jepang dengan kekuatan ekonomi untuk menyinergikan visi Indo Pasifik bersama. Penggabungan konsep menjadi optimal untuk mengurangi ancaman global untuk Indo Pasifik. Jepang melakukan penyinergian dengan ASEAN untuk memastikan tujuan AOIP tetap terlaksana dengan baik ditengah kerjasama yang terbentuk. Jepang adalah aktor keamanan yang penting dalam regionalisme Indo Pasifik, untuk itu perlu perhatian khusus untuk tetap bersikap tegas dalam setiap perubahan geopolitik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkofski, Axel, dan Sergio Miracola. 2019. *Geopolitics by Other Means. The Indo Pacific Reality*. Milano: LediPublishing.
- Bueger, Christian. 2015. *What Is Maritime Security?* .
- Buzan , Barry, dan Ole Waever. 2003. *Region and Power: The Structure of International Security* . Cambridge : Cambridge University Press .
- CounterMeasure. 2021. Countermeasure II Project. <https://www.cms.int/en/project/countermeasure-ii-project>.
- Eria. 2023. The 2nd ASEAN-Japan Symposium on Marine Plastic Waste Education . <https://www.eria.org/events/the-2nd-asean-japan-symposium-on-marine-plastic-waste-education/>.
- Herindrasti , V.L Sinta. 2019. “Fenomena Indo Pasifik dan Diplomasi Indonesia.” *Jurnal Asia Pacific Studies* 43-51.
- Hutt, David. 2021 . Sungai Mekong Jadi Sengketa Panas Baru di Indo Pasifik. 07 10 . <https://www.dw.com/id/sungai-mekong-jadi-sengketa-panas-baru-di-indo-pasifik/a-58877358>.
- JAIF ASEAN . 2022. Progress Report on Japan Cooperation for the ASEAN Outlook on the Indo Pacific . 01 November . <https://jaif.asean.org/whats-new/progress-report-on-japans-cooperation-for-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-aoip/>.
- Japan Ministry of Defense. 2019. Free and Open Indo Pacific (FOIP) Vision Japan Ministry of

- Defense's Approach .
https://www.mod.go.jp/en/d_act/exc/india_pacific/india_pacific-id.html.
- MOFA. 2022. Progress Report on Japan's Cooperation for the ASEAN Outlook on the Indo Pacific . Japan: Ministry of Foreign Affair of Japan .
- Purba, Noir Primadona, dan Kirana Agustina . 2021. Ini Alasan Kolaborasi di Wilayah ASEAN Sangat Penting Untuk Mengatasi Sampah Plastik di Laut. 27 Februari. <https://theconversation.com/ini-alasan-kolaborasi-di-wilayah-asean-sangat-penting-untuk-mengatasi-sampah-plastik-di-laut-156116>.
- Ritchie, Hanna, dan Max Roser . 2022. Plastic Pollution . April .
<https://ourworldindata.org/plastic-pollution#how-much-of-ocean-plastics-come-from-land-and-marine-sources>.
- Sivakumar , S, dan Prakash Sharma. 2021 . "Marine Plastic Pollution in Indo Pacific: 'Together' for Better 'Future'." KLRI Journal of Law and Legislation Volume 11 Number 2, 2021 130-150.
- UN-DESA . t.thn. Support for Reduction of Marine Plastic Litter in ASEAN Countries Under the "ASEAN+3 Marine Plastic Debris Cooperative Action Initiative".
<https://sdgs.un.org/partnerships/support-reduction-marine-plastic-litter-asean-countries-under-asean3-marine-plastics>.
- Yadav, Abhiram Singh. 2022. Indo Pasifik Sebuah Konstruksi Geopolitik . Jakarta: Gramedia.